

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mau kirim pasukan perdamaian ke Gaza, Prabowo didukung DPR

Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024 Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 9

Mau Kirim Pasukan Perdamaian Ke Gaza

Prabowo Didukung DPR

Senayan mendukung langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia ke Gaza. Pengiriman pasukan ini sangat memungkinkan jika Indonesia mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

KETUA Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, Indonesia juga bisa mengirim tenaga medis untuk mengoperasikan Rumah Sakit Lapangan di Gaza. "Komisi I DPR mendukung rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Kami pun telah mendengar Kementerian Pertahanan tengah menyiapkan tenaga medis dan rencana pendirian rumah sakit lapangan di Gaza," sebut Meutya kepada media di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Dia menilai, rencana Prabowo mengirim pasukan perdamaian dan tenaga medis ke Gaza dapat menjadi solusi jangka pendek bagi gencatan senjata di Gaza. Bahkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi terwujudnya 'two state solution' atau Palestina yang merdeka sepenuhnya.

Untuk itu, dia menegaskan, rencana pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia ke Gaza ini akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. "Kami akan mendengarkan dari Panglima kesiapan prajurit dan tahapan yang perlu dilakukan," sebut mantan presenter televisi swasta nasional ini.

Lebih lanjut, Meutya juga meminta seluruh pihak mendu-

kung rencana ini. Toh, Indonesia sudah sering mengirimkan pasukan perdamaian ke daerah konflik. "Indonesia telah cukup berpengalaman terkait pasukan penjaga perdamaian bahkan sejak tahun 1957. Kami yakin pasukan Indonesia siap, tinggal

menunggu mandat dari PBB," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan dan juga presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menyatakan akan siap mengirim pasukan RI, penjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini terungkap saat ia menjadi pembicara di The International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2024, Singapura, Sabtu (1/6).

Sementara anggota Komisi I DPR Jazulu Juwaini menyesalkan kekejaman Israel yang kini makin meluas ke daerah Rafah. Untuk itu, dia mendesak Dewan Keamanan PBB bertindak tegas untuk menghentikan pembantaian yang dilakukan militer Israel terhadap warga Gaza dan Rafah.

"Dewan Keamanan PBB tidak

boleh tinggal diam lagi melihat kebiadaban Israel yang sudah di luar nalar kemanusiaan," tegasnya.

Jazuli menegaskan, tidak boleh hanya karena veto satu negara yaitu Amerika Serikat, kemudian melumpuhkan peran Dewan Keamanan PBB di forum dunia. Bahkan Dewan Keamanan PBB yang harusnya lebih berperan untuk menghentikan kebiadaban Israel. "Apakah kita terus membiarkan pembantaian anak-anak dan warga sipil Gaza dan Rafah di depan mata kita. Di mana nurani dunia?" tegasnya.

Ketua Fraksi PKS ini mengatakan, dunia sangat bersedih dan menangis karena menyaksikan tidak ada lagi tempat yang aman untuk warga Palestina di Gaza dan Rafah. Israel membombardir bukan hanya rumah dan fasilitas umum, tapi juga tenda-tenda pengungsi yang berisi warga sipil, anak-anak, perempuan dan orang tua.

"Pesawat-pesawat Israel menjatuhkan bom berton-ton ke tenda pengungsian, membunuh

anak-anak kecil dan perempuan dan membakar mereka hiduphidup. Semua video dan fotofoto korban terpampang nyata di berbagai media. Dan DK PBB masih diam?" geramnya.

Makanya, dia mendorong agar gelombang protes ratusan juta penduduk dunia dengan slogan 'All Eyes on Rafah' yang bergema di sosial media harus terus digelorakan. Dia juga berharap aksi protes masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk di kampus-kampus top Eropa dan Amerika, dapat membuka mata Dewan Keamanan PBB bahwa apa yang dilakukan Israel sudah tidak bisa ditolelir. "Saatnya dunia menghentikan kebiadaban Israel," tegasnya.

Untuk itu, dia berharap besar Dewan Keamanan PBB bisa mengambil keputusan yang tegas untuk memberikan sanksi kepada Israel, termasuk dengan pengerahan pasukan perdamaian sesuai mandat PBB untuk memaksa Israel berhenti membantai warga Gaza dan Rafah.

"Israel sudah berulang kali melanggar semua hukum perang

dan humaniter internasional, menantang keputusan Mahkamah Internasional. Apa yang dilakukan Israel bukan saja merusak perdamaian, tapi telah menghancurkan kemanusiaan dunia dengan aksi genocida," katanya. # KAL